

Rencana Kerja

Dinas Perikanan
Tahun Anggaran 2025
(Perubahan APBD)



PERUBAHAN
RENJA

Albi

2025

Periode Kedua / Periode Pertama
Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029

Mei 2025

DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BELITUNG

Disperik-Kab. Belitung

Jl. Dok Kelurahan Kota Kecamatan Tanjungpandan, Telp/fax.

12.

KATA PENGATAR

Buku Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Perikanan Kabupaten Belitung merupakan Tahapan Kedua dari tiga tahun Rencana kegiatan pembangunan dan pencapaian kinerja dinas pada masa Transisi untuk Periode 2024-2026 dan merupakan Tahapan Tahun Pertama Periode Kepemimpinan tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 sambil menunggu pengesahan Renstra 2025-2029 yang akan ditetapkan paling lambat bulan agustus 2025. Adapun maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Renja ini adalah untuk memperbaiki rumusan usulan renja tahun 2025 yang telah dibuat sehingga perencanaan dan pelaksanaan dapat terlaksana dengan lebih efektif dan efesien dari segi pendanaan dan pencapaian indikator kinerja pertahunnya selain itu perubahan renja diharapkan dapat mengakomodir program kerja Bupati Terpilih untuk pelaksanaan tahun pertama. Pada periode ini diharapkan pembangunan yang dilaksanakan dapat menghasilkan pencapaian kinerja yang maksimal dari yang ditargetkan dengan cara pembinaan SDM sektor Perikanan, pembangunan sarana prasarana yang memadai dan penerapan teknologi serta keberlanjutan usaha bagi para pelaku ekonomi khususnya sektor perikanan sehingga dapat menjadi penggerak roda perekonomian di Kabupaten Belitung dengan usaha yang berdaya saing dan berkelanjutan sesuai Tujuan dinas.

Demikianlah Perubahan Renja ini dibuat agar dapat berguna dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Tahun 2025 sehingga memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat.

Tanjungpandan, 28 Mei 2025

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Belitung,



Firdaus Zamri, S.Pi
Pembina Utama Muda
NIP. 19700714 199803 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Hal i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II EVALUASI RENJA DINAS PERIKANAN S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 ...	7
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERIKANAN	27
BAB IV PENUTUP	30



DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1. Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan Pencapaian Renstra 2024 s.d 2026 Perangkat Daerah S.d Tahun 2025 Triwulan Pertama pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung.....	8
2. Tabel pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Belitung	24
3. Tabel Rancangan Perubahan Rencana kerja (Renja) Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1. Alur Perencanaan dan Penganggaran untuk tingkat daerah dan pusat	2

Bab. I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Perencanaan pembangunan nasional meliputi,

- a. rencana pembangunan jangka panjang;
- b. rencana pembangunan jangka menengah; dan
- c. rencana pembangunan tahunan.

Sistem perencanaan tersebut diatas diberlakukan mulai tingkat nasional hingga kabupaten dengan melakukan perencanaan *bottom up* dan perencanaan *top down*, di tingkat kabupaten, Perangkat Daerah (PD) diwajibkan membuat dasar perencanaan meliputi Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Renja (Renja), Renstra merupakan Perencanaan Pembangunan dalam jangka waktu 5 Tahun pelaksanaan yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD selalu berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang jangka waktu pembangunannya selama 20 tahun.

Renstra memberikan arahan dan acuan dari setiap PD agar pembangunan yang dilaksanakan dapat lebih terarah dan terfokus sehingga mencapai hasil yang berkesinambungan. Pembangunan yang diharapkan adalah pembangunan yang memberikan hasil yang tepat sasaran bukan sekedar pembangunan yang sekali pembangunan selesai tanpa berguna ditahun berikutnya.

Sedangkan Rencana kerja yang biasa didalamnya memuat rencana kerja tahunan (RKT) merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Renstra yang dibuat merupakan hasil penelaahan dan penterjemaan dari Visi dan Misi Bupati Tepilih pada sektor perikanan, merupakan bagian dari pendorong kebijakan Provinsi sebagai koordinator wilayah kerja serta menjadi bagian dari pembangunan kelautan dan perikanan Nasional yang mengarah kepada bagian terintergrasi dari tujuan kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Di dalam rencana kerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan



seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dengan Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Belitung sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 adalah sebagai berikut “

1. Pembentukan Tim Penyusun Renja,

2. Penyiapan data dan informasi,

3. Penyusunan rancangan awal,

4. Perumusan rancangan,

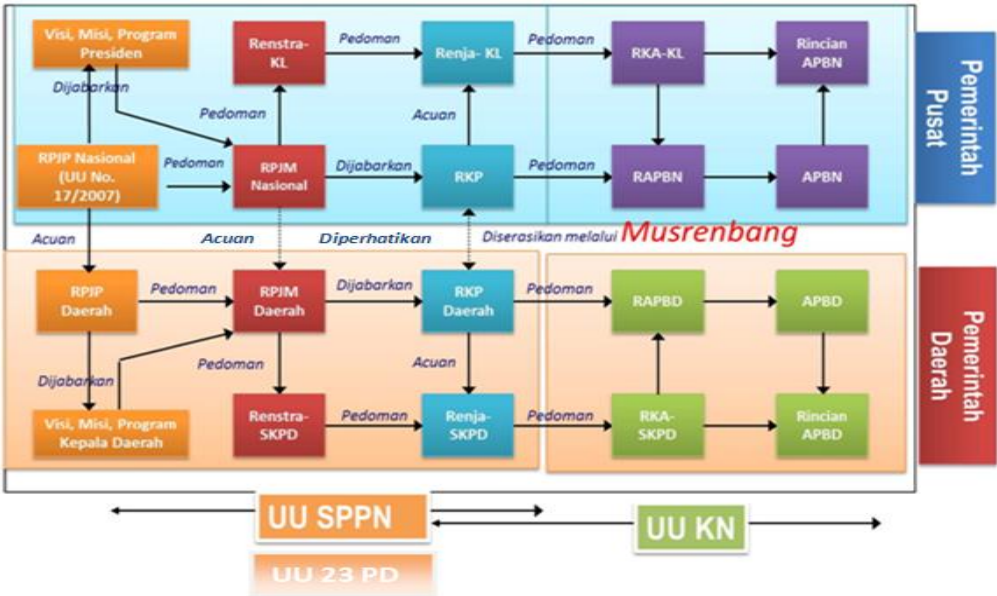
5. Verifikasi rancangan,

6. Perumusan rancangan akhir,

7. Verifikasi rancangan akhir, dan

8. Penetapan Renja melalui Peraturan Kepala Daerah.

Program, kegiatan dan pagu indikatif yang termuat pada Renja harus selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) begitu juga sebaliknya sehingga antara kedua dokumen dimaksud ada saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dokumen Renja ini akan menjadi pedoman bagi Dinas Perikanan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan selanjutnya akan menjadi bahan dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Berikut gambaran keterkaitan antara Renstra, Renja, RKPD dan Proses penyusunan APBD.



Gambar 1. Alur Perencanaan dan Penganggaran untuk tingkat daerah dan pusat

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa keberadaan dokumen Rencana Kerja sangat penting bagi Perangkat Daerah dalam menentukan arah kebijakan dan proyeksi anggaran. Dengan disusunnya dokumen Rencana Kerja maka tahapan kebijakan yang dimulai dengan formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi menjadi optimal dalam upaya akselerasi program pembangunan.

Pembangunan Sektor Perikanan tetap sejalan dengan pencapaian akhir yang akan di capai sesuai visi RPJPD kabupaten Belitung yaitu **terwujudnya Kabupaten Belitung yang mandiri dan produktif dengan memanfaatkan sumberdaya secara optimal, terpadu dan berkelanjutan bagi sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat** telah searah dan sesuai dengan pencapaian visi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yaitu **Mewujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia Yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional** dan seiring sejalan dengan pencapaian visi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu **Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi**. Dari ketiga pencapaian diatas jelas bahwa peningkatan ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat menjadi hal utama dalam pelaksanaan pembangunan.

Pencapaian pembangunan Kabupaten Belitung merupakan hasil yang optimal yang dicapai dari PD yang ada. Dinas Perikanan Kabupaten Belitung merupakan peran penting dari pembangunan yang ada di wilayah ini terkait dengan posisi Kabupaten belitung yang terletak di wilayah kepulauan. Pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Belitung diarahkan kepada pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin, peningkatan SDM pelaku sektor perikanan, pembukaan lapangan pekerjaan, pertumbuhan pembangunan dan dunia usaha yang tetap memperhatikan kondisi lingkungan yang ramah dan berkelanjutan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Tahun 2025, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;



7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
 27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 10 Seri E);
 28. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung;
 33. Peraturan Bupati Belitung No 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung;
 34. Peraturan Bupati Belitung No 53 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung;
 35. Peraturan Bupati Belitung No 90 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Belitung;

36. Peraturan Bupati Belitung Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026;
37. Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 Nomor 14).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Belitung adalah sebagai perbaikan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun anggaran yang merupakan dalam hal ini tahun 2025 yang merupakan penjabaran Rencana Strategis perangkat daerah Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 serta mengakomodir program pembangunan bupati terpilih.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk :

1. Menselaraskan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan Perubahan RKPD tahun 2025
2. Sebagai pedoman bagi Perangkat daerah untuk menyusun Perubahan Rencana kerja Anggaran (RKA)
3. Menjadi kerangka dasar bagi Perangkat Daerah dalam upayanya melaksanakan Pelayanan
4. Menjadi dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Perikanan kabupaten Belitung Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun Berkenan

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP

Bab. II

Evaluasi Renja Dinas Perikanan S.D. Triwulan I Tahun 2025

Pelaksanaan capaian kinerja Tahun 2025 merupakan periode Kedua dari pelaksanaan Renstra 2024-2026. Pencapaian pelaksanaan Tahun 2025 baru memasuki bulan Keempat (Triwulan Kedua) pelaksanaan oleh sebab itu pencapaian indikator sasaran belum dapat tergambar dengan baik karena pelaksanaan kegiatan baru dalam proses persiapan pelaksanaan.

Dari segi pencapaian perjanjian kinerja secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja Tahun 2025 SD. Triwulan pertama yang telah ditetapkan sesuai dokumen Perjanjian Kinerja berdasarkan Renstra Dinas Perikanan Tahun 2024-2026 tetapi belum dapat tergambar pencapaiannya. secara lengkap dapat dilihat pencapaian indikator kinerja tahun 2025 pada masing-masing sasaran berikut ini.

Tabel. 1 Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan Pencapaian Renstra 2024 s.d 2026 Perangkat Daerah s.d. Tahun 2025 Triwulan Pertama pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)		SKP D Pena nggu ngja wab
										I		II		III		IV										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Semua Bidang																								
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan (persen)	0.00		100.00		100										-		0.00 %		100.00			Dinas Perikanan	
			Indeks profesionalitas ASN Perangkat Daerah (persen)	0.00	25,250,400,000	109.64	-	80	7,172,803,865		1,601,187,162		-		-		-	1,601,187,162	0.00 %	22.32 %	87.71	1,601,187,162		6.34%		
			Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah (persen)	0.00		100.00		100								-			0.00 %		100.00					
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (persen)	0.00		100.00		100								-			0.00 %		100.00					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	19.00	58,800,000	0.00	-	10	13,385,700	4	4,730,500		-		-		-	4	4,730,500	40.00 %	35.34 %	0.00	4,730,500	0.00 %	43.77 %	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.00	18,300,000	0.00	-	3	3,018,100	-	-						-	-	0.00 %	0.00%	0.00	-	0.00 %	0.00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.00	6,300,000	0.00	-	1	1,959,000	-	-						-	-	0.00 %	0.00%	0.00	-	0.00 %	0.00%		

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.00	4,800,000	0.00	-	1	1,490,000	-	-							-	-	0.00 %	0.00%	0.00	-	0.00 %	0.00%	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.00	6,300,000	0.00	-	1	1,985,000	1	1,721,500							1	1,721,500	100.00%	86.73 %	1.00	1,721,500	50.00 %	27.33 %	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.00	4,800,000	0.00	-	1	1,499,000	-	-							-	-	0.00 %	0.00%	0.00	-	0.00 %	0.00%	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6.00	18,300,000	0.00	-	3	3,434,600	3	3,009,000							3	3,009,000	100.00%	87.61 %	3.00	3,009,000	50.00 %	16.44 %	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen keuangan Perangkat Daerah (Dokumen)	6.00	19,656,600,000	0.00	-	3	6,252,530,875	1	1,439,961,414			-	-	-	-	1	1,439,961,414	33.33%	23.03 %	0.00	1,439,961,414	0.00 %	7.33%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	80.00	19,650,000,000	0.00	-	40	6,250,535,875	13	1,439,961,414							3	1,439,961,414	8.33 %	23.04 %	3.33	1,439,961,414	4.17%	7.33%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.00	3,300,000	0.00	-	1	1,000,000	1	-							1	-	100.00%	0.00%	1.00	-	50.00 %	0.00%	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4.00	3,300,000	0.00	-	2	995,000	-	-							-	-	0.00 %	0.00%	0.00	-	0.00 %	0.00%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah (Orang)	80.00	399,000,000	0.00	-	40	13,000,000	40	-			-	-	-	-	10	-	25.00%	0.00%	0.00	-	0.00 %	0.00%	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	*Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	2.00	19,000,000	0.00	-	0	-	-	-							-	-	0.00 %	0.00%	0.00	-	0.00 %	0.00%	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3.00	113,000,000	0.00	-	0	-	-	-							-	-	0.00 %	0.00%	0.00	-	0.00 %	0.00%	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	12.00	267,000,000	0.00	-	4	13,000,000	-	-							-	-	0.00 %	0.00%	0.00	-	0.00 %	0.00%	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah (Persen)	200.00	1,811,000,000	0.00	-	100	374,014,000	25	76,190,988		-		-		-	25	76,190,988	25.00%	20.37%	0.00	76,190,988	0.00%	13.56%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.00	57,000,000	0.00	-	1	13,991,500	-	-							-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.00	174,000,000	0.00	-	2	25,947,000	-	-							-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.00	52,000,000	0.00	-	1	4,939,500	-	-							-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.00	583,000,000	0.00	-	2	157,110,000	-	32,163,900							-	32,163,900	0.00%	20.47%	0.00	32,163,900	0.00%	5.52%	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.00	162,000,000	0.00	-	1	40,070,000	-	-							-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.00	33,000,000	0.00	-	1	3,456,000	-	750,000							-	750,000	0.00%	21.70%	0.00	750,000	0.00%	2.27%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24.00	750,000,000	0.00	-	12	128,500,000	-	43,277,088							-	43,277,088	0.00%	33.68%	0.00	43,277,088	0.00%	5.77%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang milik daerah (Jenis)	30.00	1,060,000,000	0.00	-	3	28,459,290	-	-		-		-		-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.00	620,000,000	0.00	-	0	-	-	-							-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	27.00	240,000,000	0.00	-	11	28,459,290	-	-							-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.00	200,000,000	0.00	-	0	-	-	-							-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran (Persen)	200.00	1,031,000,000	0.00	-	100	293,011,000	25	55,435,560		-		-		-	25	55,435,560	25.00%	18.92%	0.00	55,435,560	0.00%	11.12%	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	24.0 0	26,000 ,000	0.00	-	12	1,120, 000	3	54,000							3	54,000	25.0 0%	4.82%	3.00	54,000	12. 50 %	0.21%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24.0 0	450,00 0,000	0.00	-	12	126,00 0,000	3	22,203 ,360							3	22,203 ,360	25.0 0%	17.62 %	3.00	22,203 ,360	12. 50 %	4.93%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	24.0 0	555,00 0,000	0.00	-	12	165,89 1,000	3	33,178 ,200							3	33,178 ,200	25.0 0%	20.00 %	3.00	33,178 ,200	12. 50 %	5.98%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang milik daerah dalam kondisi baik (Jenis)	18.0 0	1,234, 000,00 0	0.00	-	9	198,40 3,000	3	24,868 ,700		-		-		-	3	24,868 ,700	33.3 3%	12.53 %	0.00	24,868 ,700	0.0 0%	17.71 %	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	37.0 0	300,00 0,000	0.00	-	12	47,138 ,000	3	9,950, 000							3	9,950, 000	25.0 0%	21.11 %	3.00	9,950, 000	8.1 1%	3.32%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9.00	174,00 0,000	0.00	-	4	21,058 ,000	3	338,70 0							3	338,70 0	75.0 0%	1.61%	3.00	338,70 0	33. 33 %	0.19%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	*Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	2.00	85,000 ,000	0.00	-	1	27,500 ,000	1	9,930, 000							1	9,930, 000	100. 00%	36.11 %	1.00	9,930, 000	50. 00 %	11.68 %	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	133. 00	185,00 0,000	0.00	-	58	45,320 ,000	3	4,650, 000							3	4,650, 000	5.17 %	10.26 %	3.00	4,650, 000	2.2 6%	2.51%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	11.0 0	490,00 0,000	0.00	-	6	57,387 ,000	-	-							-	-	0.00 %	0.00%	0.00	-	0.0 0%	0.00%	
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										9.17 %	22.32 %					
										Predikat Kinerja										Sang at Rend ah	Sanga t Renda h					
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																								
2		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Thn)	1296 00.0 0	37,655 ,000,0 00	4077 4.86	-	432 00	853.66 3,950		33,178 ,200							-	33,178 ,200	0.00 %	3.89%	4310 0.00	33,178 ,200		0.09%	Din as Peri kan an

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitas, Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (Jenis)	24.00	17,355,000,000	0.00	-	4	683,581,950	1	33,178,200		-		-		-	1	33,178,200	25.00%	4.85%	0.00	33,178,200	0.00%	0.20%	
		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	*Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	2.00	600,000,000	0.00	-	1	172,775,000	-	-							-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	*Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	13.00	16,755,000,000	0.00	-	1	265,891,000	1	33,178,200							1	33,178,200	100.00%	12.48%	1.00	33,178,200	7.69%	0.20%	
		Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	*Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)		-	0.00	-	381	244,915,950	-	-							-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan yang mendapatkan fasilitas program perikanan tangkap (Orang)	860.00	20,300,000,000	0.00	-	420	161,070,640	-	-		-		-		-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	*Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	820.00	20,000,000,000	0.00	-	410	86,768,540	-	-							-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
		Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	*Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	20.00	300,000,000	0.00	-	10	74,302,100	-	-							-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah verifikasi dan Rekomendasi dokumen perizinan kapal perikanan (Dokumen)	300.00	-	0.00	-	150	9,011,360	-	-		-		-		-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
		Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	*Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan (Rekomendasi)		-	0.00	-	150	9,011,360	-	-							-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										31.15%	3.89%					
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah					



1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
3		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Thn)	525.00	3,650,000,000	427.37	-	175	860,677,932		144,094,756		-		-		-	-	144,094,756	0.00%	16.74%	170.00	144,094,756		3.95%	Dinas Perikanan	
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pembudidaya yang memperoleh pembinaan (Orang)	300.00	3,150,000,000	0.00	-	46	663,957,262	-	144,094,756		-		-		-	-	144,094,756	0.00%	21.70%	0.00	144,094,756	0.00%	5.34%		
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	*Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	46.00	450,000,000	0.00	-	6	17,317,020	-	-							-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		
		Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	*Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	40.00	2,700,000,000	0.00	-	20	646,640,242	4	144,094,756							4	144,094,756	20.00%	22.28%	4.00	144,094,756	10.00%	5.34%		
		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah verifikasi dan Rekomendasi dokumen Perizinan Pembudidayaan Ikan Kecil (Dokumen)	20.00	45,000,000	0.00	-	10	3,895,000	1	-		-		-		-	1	-	10.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		
		Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Rekomendasi)	20.00	45,000,000	0.00	-	10	3,895,000	1	-							1	-	10.00%	0.00%	1.00	-	5.00%	0.00%		
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah ketersediaan Sarana Prasarana Pembudidayaan Ikan (Jenis)	6.00	455,000,000	0.00	-	2	192,825,670	-	-		-		-		-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	11.00	455,000,000	0.00	-	1	116,692,080	-	-							-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)		-	0.00	-	1	76,133,590	-	-							-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									15.07%	16.74%							
										Predikat Kinerja									Sangat Rendah	Sangat Rendah							



1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
4		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (Persen)	0.00	-	6.64	-	7.04	383,385,179		24,883,650		-		-		-		24,883,650	0.00%	6.49%	7.02	24,883,650		0.00%	Dinas Perikanan
		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang terfasilitasi Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan (Lokasi)		-	0.00	-	16	383,385,179	3	24,883,650		-		-		-	3	24,883,650	18.75%	6.49%	0.00	24,883,650	0.00%	0.00%	
			Jumlah Lokasi yang terfasilitasi Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan undefined ()			0.00		16		-								-		0.00%		0.00		0.00%		
		Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	*Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)		-	0.00	-	36	383,385,179	21	24,883,650							21	24,883,650	58.33%	6.49%	21.00	24,883,650	0.00%	0.00%	
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										58.33%	6.49%					
										Predikat Kinerja										Rendah	Sangat Rendah					
5		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Ton/Tahun)	27150.00	1,990,000,000	9726.83	-	9050	837,245,764		160,762,797		-		-		-		160,762,797	0.00%	19.20%	9000.00	160,762,797		8.08%	Dinas Perikanan
		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Dokumen Verifikasi dan Rekomendasi Penerbitan Perizinan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (Dokumen)	56.00	-	0.00	-	28	32,316,000	2	4,000,000		-		-		-	2	4,000,000	7.14%	12.38%	0.00	4,000,000	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	*Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)		-	0.00	-	28	32,316,000		4,000,000		-					-	4,000,000	0.00%	12.38%	0.00	4,000,000	0.00%	0.00%	
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pelaku Usaha yang menerapkan Standar Keamanan Pangan (Orang)	186.00	-	0.00	-	93	737,738,468	41	156,762,797		-		-		-	41	156,762,797	44.09%	21.25%	0.00	156,762,797	0.00%	0.00%	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
		Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	*Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)		-	0.00	-	75	737,738,468	41	156,762,797							41	156,762,797	54.67%	21.25%	41.00	156,762,797	0.00%	0.00%	
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Kelompok)	28.00	1,990,000,000	0.00	-	14	67,191,296	-	-		-		-		-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	4.00	150,000,000	0.00	-	1	11,483,726	-	-							-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	20.00	1,840,000,000	0.00	-	10	55,707,570	-	-							-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										48.17%	19.20%					
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah					
								10,107,776,690		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										16.63%	19.43%					
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Rendah	Sangat Rendah					



Perlu diketahui bahwa pelaksanaan tahun 2025 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan untuk periode renstra 2024-2026. Namun demikian tahun 2025 juga merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Renstra 2025-2029 yang merupakan periode pelaksanaan visi dan misi Bupati terpilih. saat perencanaan program kegiatan untuk tahun 2025 belum memiliki acuan RPJMD Bupati Terpilih dikarenakan dokumen dimaksud dalam proses penyusunan dan penatapan. Besar harapan kami semoga penetapan RPJMD 2025-2029 dan Renstra 2025-2029 lebih dahulu dibandingkan penetapan dokumen Perubahan RKPD 2025 dan Perubahan Renja 2025. Hal ini menjadi penting karena dasar untuk perubahan renja menjadi jelas yaitu renstra 2025-2029 bukan lagi renstra 2024-2026. Untuk evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan pencapaian Renstra 2024 - 2026 pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung baru tergambar dan bisa dijelaskan untuk pelaksanaan tahun pertama renstra untuk tahun 2024. Namun demikian untuk evaluasi tahun 2025 belum dapat di sajikan pada saat pembuatan dokumen renja perubahan ini yaitu akhir bulan april 2025 karena pelaksanaan kegiatan baru memasuki triwulan pertama.

Berdasarkan data pada Tabel di atas sampai dengan Triwulan pertama Tahun 2025 diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Belitung pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 16,63 % dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 19,43 %. Berdasarkan capaian persentase tersebut, maka predikat capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Belitung pada Triwulan I Sangat Rendah (SR) dan predikat penyerapan anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Belitung juga Sangat Rendah (SR). Hal ini dikarenakan masih banyaknya kegiatan/sub kegiatan yang masih dalam proses pelaksanaan, selain itu juga ada kegiatan-kegiatan yang belum masuk jadwal pelaksanaannya sesuai perencanaan awalnya serta ada beberapa pergeseran anggaran sebagai pelaksanaan kebijakan pusat untuk efisiensi anggaran tahun 2025 di awal bulan maret dan proses harmonisasi anggaran kebijakan dari bupati terpilih.

Pada umumnya kegiatan-kegiatan dari Program yang dilaksanakan di Dinas Perikanan Kabupaten Belitung dapat terlaksana dengan baik namun masih dalam proses pelaksanaannya. Pelaksanaan Urusan Kelautan dan Perikanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung pada tahun 2024 ini dilaksanakan dengan 5 program, 16 Kegiatan dan 42 Sub kegiatan.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.172.803.865,- dan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 1.,601.187.162 ,- Realisasi capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 9,17 % dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 22,32 %. Berdasarkan capaian persentase tersebut, maka predikat capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Triwulan I adalah Sangat Rendah dan predikat penyerapan anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Adalah Sangat Rendah.

Capaian Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan tahun 2025 sebesar 100 % dari target yang ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 100 %.
- Faktor pendukung keberhasilan capaian Indikator 1. Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan diatas antara lain yaitu:

1. Koordinasi dan kerjasama yang baik antara bidang dengan sekretariat dalam penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi kinerja;
2. SDM yang memadai baik di sekretariat maupun di bidang selaku mitra dalam penyusunan dokumen;
3. Dukungan yang baik dari atasan langsung dalam proses penyusunan dokumen sehingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Faktor penghambat/kendala pencapaian Indikator persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan diatas antara lain yaitu:

1. Jadwal yang terlalu padat untuk beberapa dokumen yang harus diselesaikan dengan tepat waktu membuat hasil yang disusun kurang maksimal;
2. Beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana menyebabkan penyerapan anggaran menjadi lebih kecil dari yang semestinya;

Strategi/rencana tindak peningkatan capaian kinerja /mempertahankan kinerja untuk Indikator persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan diatas antara lain yaitu:

1. Mengoptimalkan pelaksanaan tahapan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi kinerja dengan baik, semaksimal mungkin dapat dikerjakan sesuai dengan waktu pelaksanaannya sehingga dokumen dapat diselesaikan dengan tepat waktu;
2. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak yang berperan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi kinerja diantaranya masing masing bidang di Dinas Perikanan, Bappeda, BPKAD dan Inspektorat serta pihak terkait lainnya.

2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah tahun 2025 sebesar 87,71 persen atau mencapai 109,64 % dari target yang ditetapkan sebesar 80 % .

Faktor pendukung keberhasilan capaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah diatas antara lain yaitu:

1. SDM Dinas Perikanan yang berkualitas dari berbagai perguruan tinggi di sektor perikanan dan telah memiliki beberapa SDM yang Strata2;
2. Dukungan yang baik dari atasan langsung dalam proses peningkatan kemampuan teknis pegawai baik untuk pelatihan teknis maupun meningkatkan jenjang pendidikan.

Faktor penghambat/kendala pencapaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah antara lain yaitu:

1. Mutasi Pegawai yang berkinerja baik atau purnatugas pegawai menyebabkan berkurangnya indeks Profesional ASN;
2. Penerimaan PNS dan CPNS yang sedikit tidak berbanding dengan yang mutasi dan purnatugas menyebabkan jumlah pegawai dinas menurun;
3. Masih kurangnya ASN yang memiliki Sertifikat PBJ yang menyebabkan kurangnya Pejabat pengadaan dan Pejabat pembuat Komitmen.

Strategi/rencana tindak peningkatan capaian kinerja /mempertahankan kinerja untuk Indikator Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah antara lain yaitu:

1. Mengoptimalkan pelaksanaan penerimaan CPNS dan P3K di Dinas Perikanan dengan mendorong honorer untuk mengikuti pelaksanaan dimaksud;

2. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak yang berperan dalam rekrutmen pegawai diantaranya BPKSDM, Bagian Organisasi Setda dan Inspektorat serta pihak terkait lainnya;
 3. Mengusulkan ASN untuk mengikuti ujian sertifikasi PBJ.
3. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah tahun 2025 sebesar 100 persen dari target yang ditetapkan sebesar 100 persen.

Faktor pendukung keberhasilan capaian Indikator Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah diatas antara lain yaitu:

1. Koordinasi dan kerjasama yang baik antara bidang dengan sekretariat dalam penggunaan pelayanan administrasi perkantoran;
2. SDM yang menghargai pemanfaatan sarpras kantor dengan baik di sekretariat maupun di bidang;
3. Dukungan yang baik dari atasan langsung dalam penyediaan pelayanan administrasi perkantoran.

Faktor penghambat/kendala pencapaian Indikator Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah antara lain yaitu:

1. Masih diperlukan penambahan pegawai dinas perikanan baik melalui mutasi, penerimaan CPNS ataupun PPPK karena jumlah yang tersedia sekarang masih kurang jika dibandingkan dengan beban kerja yang ada.

Strategi/rencana tindak peningkatan capaian kinerja /mempertahankan kinerja untuk Indikator Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah antara lain yaitu:

1. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah dengan baik sehingga dapat dilaksanakan dengan maksimal sesuai dengan ketentuan;
2. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak yang berperan sehingga pelayanan administrasi perkantoran dapat diberikan dengan baik.

4. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur tahun 2025 sebesar 100 persen dari target yang ditetapkan sebesar 100 persen.

Faktor pendukung keberhasilan capaian Indikator Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur diatas antara lain yaitu:

1. Ketersediaan sebagian besar sarpras telah dimiliki dinas dan dalam kondisi baik sehingga pelayanan dapat diberikan dengan baik;
2. Biaya pemeliharaan yang cukup memadai setiap tahunnya sehingga barang milik daerah dapat digunakan dengan optimal;
3. Pelaksanaan Pengadaan Sarpras dapat berjalan dengan baik di tahun 2024.

Faktor penghambat/kendala pencapaian Indikator Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur antara lain yaitu:

1. Masih ada barang milik Negara yang jumlahnya masih kurang, misalnya mobil operasional kantor yang masih perlu ditambah untuk meningkatkan mobilisasi pelaksanaan tupoksi dan kegiatan.

Strategi/rencana tindak peningkatan capaian kinerja /mempertahankan kinerja untuk Indikator Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur antara lain yaitu:

1. Mengoptimalkan penggunaan sarpras yang ada dengan memelihara sarpras tersebut dengan baik;
2. Melakukan inventaris barang baik yang dalam kondisi baik, rusak ataupun rusak berat sehingga pengadaan barang/jasa dapat di laksanakan sesuai prioritas.

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 853,663,950,- dan realisasi anggaran sampai Triwulan I 2025 adalah sebesar Rp. 33,178,200,- Realisasi capaian kinerja Program Pengelolaan Perikanan Tangkap pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 31,15 % dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 3,89 %. Berdasarkan capaian persentase tersebut, maka predikat capaian kinerja Program Pengelolaan Perikanan Tangkap pada Triwulan II adalah Sangat Rendah dan predikat penyerapan anggaran Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Adalah Sangat Rendah.

Faktor pendukung keberhasilan capaian Indikator Produksi Perikanan Tangkap diatas antara lain yaitu:

1. Produksi Perikanan Tangkap pada Tahun 2024 mengalami peningkatan yaitu dari produksi Tahun 2023 sebesar 42.220,30 ton menjadi 40.774,86 ton pada Tahun 2024. Nilai produksi perikanan tangkap relatif masih tinggi karena kondisi cuaca dan perairan di Tahun 2024 cenderung stabil seperti Tahun 2023 sehingga hasil tangkapan nelayan masih diatas rata-rata terkecuali pada triwulan ke empat;
2. Ketersediaan BBM, kebutuhan pokok untuk melaut dan keperluan lainnya yang mudah diperoleh nelayan sehingga operasional melaut dapat terpenuhi dengan baik;
3. Beberapa kelompok nelayan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Belitung melalui Dinas Perikanan Kabupaten Belitung berupa Mesin kapal perikanan, Fish Finder dan alat penangkap ikan untuk memudahkan nelayan dalam menangkap ikan;
4. Penggunaan teknologi penangkapan ikan yang sudah diaplikasikan oleh beberapa nelayan seperti penggunaan GPS dan Fish Finder dalam aktivitas penangkapan ikan;
5. Pembinaan dan penyuluhan yang dilaksanakan rutin kepada nelayan kecil dan Kelompok Usaha Bersama terkait penggunaan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan, serta kesadaran untuk melaporkan hasil produksi perikanan tangkap.

Faktor penghambat/kendala pencapaian Indikator Produksi Perikanan Tangkap diatas antara lain yaitu

1. Penurunan produksi yang dialami pada Tahun 2024 lebih kepada zona penangkapan nelayan yang lebih jauh sehingga harus bersaing dengan nelayan luar daerah yang izinnya diterbitkan oleh kementerian yang armadanya lebih besar;
2. Adanya kapal penangkapan ikan menggunakan alat tangkap compreng yang mengganggu daerah tangkapan nelayan kecil;
3. Penurunan produksi pada triwulan keempat akibat kondisi cuaca yang ekstrem pada musim barat;
4. Kondisi sarana dan prasarana seperti dermaga tambat labuh nelayan di beberapa lokasi yang sudah mengalami kerusakan.

Strategi/rencana tindak peningkatan capaian kinerja /mempertahankan kinerja untuk Indikator Produksi Perikanan Tangkap diatas antara lain yaitu:

1. Nelayan Belitung perlu melakukan modernisasi armada penangkapan yang lebih besar lagi sehingga jangkauan wilayah penangkapan menjadi lebih jauh;
2. Terus melakukan pembinaan kepada kelompok nelayan sehingga dapat mentertibkan administrasi dokumen kepemilikan kapal saat melaut;
3. Tetap memberikan regulasi dan kebijakan yang mendukung ketersediaan operasional nelayan kecil untuk tetap dapat melaut dengan baik seperti BBM, Kebutuhan pokok, alat tangkap dan sebagainya;
4. Mendukung nelayan kecil untuk mengikuti program kementerian yang pro nelayan diantaranya asuransi nelayan, sehat nelayan, kartu kusuka dan program inovatif lainnya;
5. Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan pembinaan terkait pemahaman penggunaan teknologi penangkapan ikan;
6. Memaksimalkan kegiatan pengawasan terkait masuknya nelayan luar dan aktivitas illegal fishing serta penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yang beroperasi di perairan Kabupaten Belitung;
7. mengoptimalkan usaha penangkapan ikan pada musim puncak sebelum musim pancaroba (paceklik) berlangsung;
8. Melakukan pengendalian distribusi BBM minyak solar secara teratur dan terarah di titik penyalur sesuai dengan kebutuhan berdasarkan mesin kapal, alat penangkapan ikan dan lokasi fishing ground sehingga pengalokasian BBM minyak solar untuk usaha perikanan/nelayan dapat tepat sasaran.

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 860.677.932,- dan realisasi anggaran sampai Triwulan I 2025 adalah sebesar Rp. 144.094.756,- Realisasi capaian kinerja Program Pengelolaan Perikanan Budidaya pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 15,07 % dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 16,74 %. Berdasarkan capaian persentase tersebut, maka predikat capaian kinerja Program Pengelolaan Perikanan Budidaya pada Triwulan I adalah Sangat Rendah dan predikat penyerapan anggaran Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Adalah Sangat Rendah.

Faktor pendukung keberhasilan capaian Indikator Produksi Perikanan Budidaya diatas antara lain yaitu:

1. Adanya dukungan program bantuan sarpras budidaya kepada masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Dinas perikanan.
2. Peningkatan produksi udang vanamei yang signifikan tinggi pada tahun 2024 nilainya mencapai 269,44 ton dibandingkan tahun 2023 yang hanya mencapai 7,35 ton;
3. Koordinasi dan kerjasama yang baik antara bidang budidaya Dinas Perikanan dengan pelaku pembudidaya, baik dalam hal pengumpulan data (survey awal), penentuan lokasi kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan monitoring kegiatan;
4. SDM yang memadai.

Faktor penghambat/kendala pencapaian Indikator Produksi Perikanan Budidaya diatas antara lain yaitu

1. Menurunnya produksi ikan kerapu yakni yang semula mencapai 118,50 ton di tahun 2023, di tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 65,40 ton. Penurunan ekspor tersebut disebabkan karena melimpahnya stok ikan kerapu di Hongkong dari berbagai daerah lainnya dan adanya permintaan ikan kerapu dengan ukuran tertentu sehingga menyebabkan pembudidaya harus menunggu hingga ukuran tersebut tercapai agar ikannya dapat dijual;
2. Harga pakan ikan yang relative masih cukup tinggi;
3. Ketersediaan pangsa pasar yang sedikit atau terbatas.

Strategi/rencana tindak peningkatan capaian kinerja /mempertahankan kinerja untuk Indikator Produksi Perikanan Budidaya diatas antara lain yaitu:

1. Melaksanakan pembinaan kepada pembudidaya untuk melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) budidaya yang baku, baik Cara Pembenihan Ikan Yang baik (CPIB) maupun Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB).
2. Memberikan bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan bagi pembudidaya ikan air laut maupun air tawar.
3. Diversifikasi komoditas perikanan budidaya dengan cara membudidayakan komoditas baru yang selama ini belum dikembangkan;
4. Mengembangkan inovasi di bidang perikanan air laut, air tawar dan air payau. diantaranya mendorong masyarakat untuk membudidayakan udang vanamei dan kepiting bakau;
5. Mengoptimalkan pelaksanaan tahapan kegiatan dengan baik dan maksimal sesuai dengan waktu pelaksanaannya;
6. Menjalin kerja sama yang lebih baik dengan para pelaku pembudidaya;
7. Melakukan perencanaan dan pencatatan produksi perikanan yang tepat dan merata sehingga diperoleh nilai produksi perikanan budidaya yang akurat.

Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 383.385.179,- dan realisasi anggaran sampai Triwulan I 2025 adalah sebesar Rp. 24.883.650,- Realisasi capaian kinerja Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan pada Triwulan I Tahun 2025 masih sebesar 58,33 % dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 6,49 %. Berdasarkan capaian persentase tersebut, maka predikat capaian kinerja Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan pada Triwulan I adalah Rendah dan predikat penyerapan anggaran Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan Adalah Sangat Rendah.

Faktor pendukung keberhasilan capaian Indikator Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam batasan Biologis yang aman diatas antara lain yaitu:

1. Sebagian besar Penangkapan ikan dilakukan dengan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan;
2. Pembinaan kepada kelompok nelayan terkait sumberdaya perikanan yang berkelanjutan;
3. Kegiatan sudah terencana dengan baik antara lain : nelayan dan bidang Perikanan Tangkap memantapkan koordinasi antara Pejabat Pembuat Komitmen sebagai penanggung jawab sehingga kegiatan berjalan sesuai rencana.

Faktor penghambat/kendala pencapaian Indikator Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam batasan Biologis yang aman diatas antara lain yaitu

1. Lemahnya pengawasan sumberdaya perikanan di wilayah tangkapan nelayan di beberapa titik penangkapan;
2. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat nelayan dalam menjaga kelestarian ekosistem sumberdaya perikanan;
3. Masih ditemukan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yang dapat merusak ekosistem sumberdaya perikanan;
4. Faktor cuaca yang tidak mendukung seperti misalnya musim barat sehingga nelayan tidak melakukan aktivitas penangkapan;
5. Ketersediaan BBM yang sempat mengalami kelangkaan di Kabupaten Belitung.

Strategi/rencana tindak peningkatan capaian kinerja /mempertahankan kinerja untuk Indikator Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam batasan Biologis yang aman diatas antara lain yaitu:

1. Melakukan pembinaan kepada masyarakat nelayan melalui sosialisasi;
2. Meningkatkan peran aktif kelompok masyarakat pengawas perikanan (POKMASWAS) dalam menjaga kelestarian dan keamanan sumberdaya perikanan;
3. Melibatkan peran serta kelompok masyarakat peduli lingkungan dalam rangka pemulihan dan pelestarian sumberdaya perikanan;
4. Mengintensifkan komunikasi dan kerjasama antara para nelayan dengan pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Belitung serta pihak Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan;

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 837.245.764,- dan realisasi anggaran sampai Triwulan I 2025 adalah sebesar Rp. 160.762.797,- Realisasi capaian kinerja Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 48,17 % dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 19,20 %. Berdasarkan capaian persentase tersebut, maka predikat capaian kinerja Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan pada Triwulan I adalah Sangat Rendah dan predikat penyerapan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Adalah Sangat Rendah.

Faktor pendukung keberhasilan capaian Indikator Produksi Pengolahan Hasil Perikanan diatas antara lain yaitu:

1. Kondisi cuaca dan musim mempengaruhi jumlah hasil tangkapan nelayan sepanjang tahun;
2. Adanya upaya peningkatan nilai tambah produk perikanan melalui sentuhan pengolahan dan diversifikasi produk olahan;
3. Permintaan pasar yang tinggi terhadap ikan dari Kabupaten Belitung (Market driven);
4. Tingginya tingkat konsumsi ikan dan olahan hasil perikanan di Kabupaten Belitung pada tahun 2024 yang mencapai 71,44 kg/kapita/tahun;
5. Kondusifnya iklim usaha bagi Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan UMKM;
6. Lancarnya transportasi untuk pengiriman ikan keluar daerah;
7. Terjaminnya mutu produk perikanan baik untuk konsumsi lokal maupun yang dikirim karena penerapan standar kelayakan pengolahan;
8. Adanya pembinaan yang kontinyu terhadap pelaku usaha perikanan.

Faktor penghambat/kendala pencapaian Indikator Produksi Pengolahan Hasil Perikanan diatas antara lain yaitu

1. Hasil tangkapan yang sedikit menurun dan mengalami fluktuasi dikarenakan musim dan cuaca mempengaruhi ketersediaan bahan baku untuk proses pengolahan lebih lanjut. Pada tahun 2024 hasil tangkapan berjumlah 40.774,86 ton sedangkan pada tahun 2023 berjumlah 42.220,30 ton;
2. Fluktuasi harga komoditi perikanan dan olahan hasil perikanan yang relatif tinggi, menyebabkan konsumen mudah berpindah kepada produk substitusi;
3. Menurunnya tingkat kunjungan wisata berpengaruh pada serapan pasar oleh-oleh olahan perikanan yang berimbas produksi UMKM;
4. Sistem pengumpulan data yang sangat tergantung pada berbagai sumber data dan personil pengumpul data.

Strategi/rencana tindak peningkatan capaian kinerja /mempertahankan kinerja untuk Indikator Produksi Pengolahan Hasil Perikanan diatas antara lain yaitu:

1. Terus melaksanakan sosialisasi kepada pelaku usaha perikanan akan pentingnya menjaga mutu hasil perikanan sejak proses penangkapan dan

- selalu menjaga lingkungan penangkapan dan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan;
2. Terus bekerjasama secara kolaboratif dengan dinas dan instansi serta stakeholder terkait, berkenaan dengan peningkatan produksi olahan hasil perikanan, serta terus melaksanakan pembinaan terhadap penerapan standar kelayakan pengolahan hasil perikanan; misalnya dengan Dinas KUKMPTK, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), serta Loka POM Kabupaten Belitung;
 3. Terus memfasilitasi pemasaran produk hasil perikanan; misalnya melalui even pameran dan expo pada Hari Jadi Kota Tanjungpandan;
 4. Melaksanakan pendataan secara kontinyu dan tepat waktu serta menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait; misalnya terus melaksanakan kesepakatan yang telah ditandatangani (MoU) antara Dinas Perikanan Kabupaten Belitung dengan Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Pangkal Pinang yang sekarang telah berubah menjadi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Pangkal Pinang.

Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Belitung dicapai dengan melaksanakan tugas dan fungsi dari masing-masing bidang yang ada serta menitikberatkan kepada kekuatan pelayanan yang dipegang pada sub koordinator yang ada. Kekuatan pelayanan sektor perikanan juga sangat ditunjang realisasi pelaksanaan kegiatan dalam rangkaian periode Renstra. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan dari tahun ke tahun yang lalu yang mengacu Renstra 2024-2026 dapat dilihat pencapaian Indikator Kinerja sampai dengan Periode pertama pada Rangkaian Renstra 2024-2026 Pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung sesuai Tabel berikut:

Tabel 2. Tabel pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Belitung

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Data Awal Tahun 2022	Target Renstra 2024-2026			Realisasi Capaian Periode Renstra 2024-2026			Proyeksi	Catatan Analisis
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2026	
1	Kontribusi sub sektor Perikanan terhadap PDRB Kab. Belitung	-	-	22,07*	22,10	22,15	22,20	5,36	-	-	22,20	Realisasi 2023 : 23,25
2	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	-	-	113,35	114	115	116	109,83	-	-	116	Realisasi 2023 : 112,52
3	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	-	-	104,8	105	106	107	105,56	-	-	107	Realisasi 2023 : 106,02
4	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	-	-	3,650	-	-	-			-	-	Realisasi 2023 : 3,905
5	Konsumsi Ikan	-	-	70,60	-	-	-			-	-	Realisasi 2023 : 72,2



Pencapaian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten ini dapat dilihat dari urutan pencapaian yaitu dari pencapaian output Kegiatan pada tataran yang sangat rendah, kemudian output tersebut memberikan hasil apa terhadap pelaksanaan masing-masing kegiatan, kumpulan hasil dari semua kegiatan pada satu program ini akan menjamin keberhasilan program secara utuh dengan melihat pencapaian dari masing-masing indikator program. Kemudian pada tataran lebih tinggi lagi indikator program akan sejalan menunjang indikator pencapaian sasaran dari masing-masing tujuan yang menjadi puncak utama dalam menjamin tercapainya misi dan visi bupati terpilih. Untuk tahun 2025 yang merupakan masa transisi tahun kedua dan merupakan periode pertama dari 5 periode bupati terpilih untuk melaksanakan Visi dan misinya.

Tabel pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tabel diatas merupakan ukuran pencapaian yang tertuang dalam perjanjian kinerja diantaranya Indikator tujuan renstra 2024-2026 yaitu nilai kontribusi sub sektor Perikanan terhadap PDRB Kab. Belitung (%) dan indikator sasaran renstra yang akan menunjang pencapaian untuk indikator tujuan renstra Dinas Perikanan Kabupaten Belitung terdiri dari (1) Indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan (2) Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi). Sedangkan indikator yang terakhir merupakan indikator lainnya yang tertuang dalam lakip dinas perikanan kabupaten belitung yaitu nilai konsumsi ikan,

Berikut dapat dijelaskan terkait indikator kinerja yang menjadi pencapaian untuk periode Renstra 2024-2026 di atas adalah sebagai berikut :

1. Nilai Kontribusi sub sektor Perikanan terhadap PDRB Kab. Belitung Indikator ini merupakan Indikator yang digunakan untuk mengetahui persentase kontribusi PDRB subsektor Perikanan terhadap Total PDRB Kabupaten Belitung. Dimana Nilai kedua PDRB tersebut diperoleh dari BPS Kabupaten Belitung. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

Dengan demikian dapat diartikan semakin tinggi nilai persentase PDRB Sektor Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Belitung dapat diartikan bahwa semakin tinggi juga pengaruh sektor perikanan dalam meningkatkan ekonomi Kabupaten Belitung yang didalamnya diperoleh banyak kesempatan bekerja bagi masyarakat dalam hal ini nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku sektor perikanan lainnya. Kesempatan kerja yang tinggi ini akan meningkatkan pendapatan yang pada akhirnya perekonomian pelaku sektor perikanan juga semakin baik

2. Nilai Tukar Nelayan (NTN)
Indikator ini digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan nelayan, sebagai persentase dari perbandingan indeks harga yang diterima nelayan terhadap indeks harga yang dibayar nelayan selama satu tahun dan merupakan perbandingan antara harga produksi dengan harga konsumsi nelayan yang ada di seluruh kecamatan Kabupaten Belitung yang diperoleh melalui survey oleh petugas di lapangan.

3. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)

Indikator ini digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan, sebagai persentase dari perbandingan indeks harga yang diterima pembudidaya ikan terhadap indeks harga yang dibayar pembudidaya ikan. Nilai ini diperoleh dengan cara membandingkan antara harga produksi dengan harga konsumsi pembudidaya ikan selama satu tahun yang ada di seluruh kecamatan Kabupaten Belitung yang diperoleh melalui survey oleh petugas.

4. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Indikator ini digunakan untuk mengetahui data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei Kepuasan Masyarakat bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan acuan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas publik selanjutnya

5. Tingkat Konsumsi Ikan

Indikator ini digunakan untuk mengetahui besarnya pasar ikan di dalam negeri, untuk perencanaan pemenuhan kebutuhan ikan dan untuk mengetahui pola pemanfaatan sumber protein hewani. Dengan mengetahui tingkat konsumsi ikan per kapita, akan dapat diperkirakan besarnya penyerapan ikan di Kabupaten Belitung selama satu tahun. Nilai konsumsi ikan merupakan tingkat konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Belitung terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam satuan kg/kapita/tahun yang ada di seluruh Kecamatan Kabupaten Belitung yang diperoleh melalui survey oleh petugas. Dalam penyajiannya dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan oleh Dinas Perikanan.

Berdasarkan Tabel diatas pencapaian yang dicapai dari 5 (lima) indikator tersebut sudah tergambar dengan baik untuk periode pertama renstra 2024-2026 yaitu nilai realisasi indikator Kontribusi sub sektor Perikanan terhadap PDRB Kab. Belitung sebesar 5,36 Nilai Tukar Nelayan sebesar 109,83 , Nilai indikator Nilai Tukar Pembudidaya sebesar 105,56.

Sedangkan untuk Tahun 2023 nilai realisasi indikator Kontribusi sub sektor Perikanan terhadap PDRB Kab. Belitung sebesar 23,25, Nilai Tukar Nelayan sebesar 112,52, Nilai indikator Nilai Tukar Pembudidaya sebesar 106,02, Nilai indikator Survey Kepuasan Masyarakat sebesar 3,905 dan indikator Nilai konsumsi ikan sebesar 72,2.

Bab. III

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perikanan

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil, verifikasi, validasi dan inventarisasi pemuktakhiran klarifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Serta tetap mengacu kepada Rancangan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.

Perubahan Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan tersebut telah mempedomani dan telah diselaraskan dengan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Belitung tahun 2025. Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen rencana strategis Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perubahan Rencana Kerja (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, Sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

Berdasarkan Renstra 2024-2026 yang sedang ditetapkan pada tahun 2023 sebagai amanat dari pelaksanaan permendagri 90 tahun 2019 maka Dinas Perikanan Kabupaten Belitung akan melaksanakan program untuk tahun 2025 sebanyak 5 Program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Rumusan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung sebagai berikut sesuai dengan tabel dibawah ini :

Tabel 3. Tabel Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. BELITUNG
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERIKANAN							17.260.444.043,00	10.649.423.284,00	9.866.566.106,00	-7.393.877.937,00						24.820.004.000,00		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							17.260.444.043,00	10.649.423.284,00	9.866.566.106,00	-7.393.877.937,00							24.820.004.000,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							17.260.444.043,00	10.649.423.284,00	9.866.566.106,00	-7.393.877.937,00							24.820.004.000,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan				100 %	100 %	7.960.058.830,00	7.596.594.705,00	7.024.954.875,00	310.341.170,00							8.270.400.000,00	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	18.150.930,00	18.150.930,00	10.415.500,00	-7.735.430,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian	Aparatur Perangkat Daerah		20.200.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	5.665.450,00	5.665.450,00	1.789.500,00	-3.875.950,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian			6.200.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.959.000,00	1.959.000,00	1.302.500,00	-656.500,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian			2.200.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.490.000,00	1.490.000,00	1.037.300,00	-452.700,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian			1.700.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.985.000,00	1.985.000,00	1.985.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian			2.200.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.499.000,00	1.499.000,00	866.600,00	-632.400,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian			1.700.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	5.552.480,00	5.552.480,00	3.434.600,00	-2.117.880,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian			6.200.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen keuangan perangkat daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	6.551.995.000,00	6.252.530.875,00	6.252.530.875,00	-299.464.125,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian	Aparatur Perangkat Daerah		6.601.200.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/b ulan	40 Orang/b ulan	6.550.000.000,00	6.250.535.875,00	6.250.535.875,00	-299.464.125,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian			6.600.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian			0,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																			
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	995.000,00	995.000,00	995.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian			1.200.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah</i>				40 Orang	40 Orang	84.000.000,00	30.000.000,00	9.100.000,00	-74.900.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian	Aparatur Perangkat Daerah		132.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																			
			<i>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian			7.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				2 Paket	2 Paket	24.000.000,00	0,00	0,00	-24.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian			35.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				4 Orang	2 Orang	60.000.000,00	30.000.000,00	9.100.000,00	-50.900.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian			90.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah</i>				100 %	100 %	580.885.300,00	570.885.300,00	299.638.700,00	-281.246.600,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian	Aparatur Perangkat Daerah		645.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	13.991.500,00	13.991.500,00	9.758.300,00	-4.233.200,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian			20.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	2 Paket	51.998.900,00	51.998.900,00	18.157.300,00	-33.841.600,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian			60.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	9.991.900,00	9.991.900,00	3.715.100,00	-6.276.800,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian			19.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	2 Paket	197.916.000,00	197.916.000,00	109.065.000,00	-88.851.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian			204.000.000,00	DINAS PERIKANAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	49.999.000,00	49.999.000,00	28.027.000,00	-21.972.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian			55.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.988.000,00	6.988.000,00	2.416.000,00	-4.572.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian			12.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	240.000.000,00	128.500.000,00	-121.500.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian			275.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis Barang Milik Daerah				3 Jenis	3 Jenis	100.137.000,00	100.137.000,00	0,00	-100.137.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian	Aparatur Perangkat Daerah		70.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian			70.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	3 Unit	100.137.000,00	100.137.000,00	0,00	-100.137.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian			0,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian			0,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran				100 %	100 %	310.891.000,00	310.891.000,00	268.496.800,00	-42.394.200,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian	Aparatur Perangkat Daerah		357.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	784.000,00	-4.216.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian			9.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	140.000.000,00	140.000.000,00	135.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian			160.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	165.891.000,00	165.891.000,00	132.712.800,00	-33.178.200,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian			188.000.000,00	DINAS PERIKANAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik				9 Jenis	9 Jenis	313.999.600,00	313.999.600,00	184.773.000,00	-129.226.600,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian	Aparatur Perangkat Daerah		445.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	14 Unit	82.742.000,00	82.742.000,00	47.138.000,00	-35.604.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian			108.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	43.438.000,00	43.438.000,00	21.058.000,00	-22.380.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian			72.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																			
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	27.500.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian			30.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				58 Unit	58 Unit	45.320.000,00	45.320.000,00	31.690.000,00	-13.630.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian			65.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	114.999.600,00	114.999.600,00	57.387.000,00	-57.612.600,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian			170.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap				43200 Ton/Tahun	43200 Ton/Tahun	6.940.563.438,00	893.625.928,00	741.879.180,00	6.444.040.562,00							13.384.604.000,00		
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi, Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap				4 Jenis	4 Jenis	710.578.830,00	689.533.770,00	617.628.750,00	-92.950.080,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian	Aparatur Perangkat Daerah dan Kelompok Masyarakat Perikanan Tangkap		6.184.604.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																			
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	199.771.880,00	178.726.820,00	170.000.000,00	-29.771.880,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian			200.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap																			
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	265.891.000,00	265.891.000,00	202.712.800,00	-63.178.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian			5.454.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				3.807 Unit	3.807 Unit	244.915.950,00	244.915.950,00	244.915.950,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Selat Naskik, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian			530.604.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah nelayan yang mendapatkan fasilitasi program perikanan tangkap				420 Orang	31 Orang	6.199.988.878,00	183.807.398,00	120.434.430,00	-6.079.554.448,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian	Aparatur Perangkat Daerah dan Kelompok Masyarakat Perikanan Tangkap		7.100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																		
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				410 Orang	11 Orang	6.099.989.498,00	99.989.498,00	81.018.540,00	-6.018.970.958,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Simpang Rusa Kab. Belitung, Selat Naskik, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian			7.000.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				10 Kelompok	10 Kelompok	99.999.380,00	83.817.900,00	39.415.890,00	-60.583.490,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah verifikasi dan Rekomendasi dokumen perizinan kapal perikanan				150 Dokumen	150 Dokumen	29.995.730,00	20.284.760,00	3.816.000,00	-26.179.730,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian	Aparatur Perangkat Daerah dan Kelompok Masyarakat Perikanan Tangkap		100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.04.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT																		
			Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan				150 Rekomendasi	150 Rekomendasi	29.995.730,00	20.284.760,00	3.816.000,00	-26.179.730,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Selat Naskik, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya				175 Ton/Tahun	175 Ton/Tahun	981.492.182,00	892.795.532,00	740.035.870,00	513.507.818,00							1.495.000.000,00	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pembudidaya yang memperoleh pembinaan				46 Orang	42 Orang	776.903.842,00	693.343.912,00	544.258.700,00	-232.645.142,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian	Aparatur Perangkat Daerah dan Kelompok Masyarakat Perikanan Budidaya		1.050.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				6 Kelompok	2 Kelompok	60.000.000,00	34.385.400,00	16.873.020,00	-43.126.980,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian			150.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				20 Kelompok	20 Kelompok	716.903.842,00	658.958.512,00	527.385.680,00	-189.518.162,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian			900.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah verifikasi dan Rekomendasi dokumen Perizinan Pembudidayaan Ikan Kecil				10 Dokumen	10 Dokumen	7.989.750,00	5.125.950,00	2.951.500,00	-5.038.250,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian	Aparatur Perangkat Daerah dan Kelompok Masyarakat Perikanan Budidaya		15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.03.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				10 Rekome ndasi	10 Rekome ndasi	7.989.750,00	5.125.950,00	2.951.500,00	-5.038.250,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian			15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	<i>Jumlah ketersediaan Sarana Prasarana Pembudidayaan Ikan</i>				2 Jenis	2 Jenis	196.598.590,00	194.325.670,00	192.825.670,00	-3.772.920,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian	Aparatur Perangkat Daerah dan Kelompok Masyarakat Perikanan Budidaya		430.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 Unit	1 Unit	116.692.080,00	116.692.080,00	116.692.080,00	0,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian			130.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 Unit	1 Unit	79.906.510,00	77.633.590,00	76.133.590,00	-3.772.920,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian			300.000.000,00	DINAS PERIKANAN
4.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman				7.04 %	7.04 %	447.292.139,00	413.399.735,00	373.688.489,00	22.707.861,00							470.000.000,00	
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Lokasi yang terfasilitasi Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan</i>				16 Lokasi	6 Lokasi	447.292.139,00	413.399.735,00	373.688.489,00	-73.603.650,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian	Aparatur Perangkat Daerah dan Kelompok Masyarakat Pengelolah Sumber Daya Perikanan		470.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota																		
			<i>Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota</i>				36 Pelaku Usaha	27 Pelaku Usaha	447.292.139,00	413.399.735,00	373.688.489,00	-73.603.650,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian			470.000.000,00	DINAS PERIKANAN
5.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan				9050 Ton/Tahun	9050 Ton/Tahun	931.037.454,00	853.007.384,00	986.007.692,00	268.962.546,00							1.200.000.000,00	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	<i>Dokumen Verifikasi dan Rekomendasi Penerbitan Perizinan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan</i>				28 Dokumen	28 Dokumen	51.739.500,00	36.442.050,00	29.221.200,00	-22.518.300,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian	Aparatur Perangkat Daerah dan Kelompok Masyarakat Pengelolah Hasil Perikanan		100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko																		
			<i>Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko</i>				28 Dokumen	28 Dokumen	51.739.500,00	36.442.050,00	29.221.200,00	-22.518.300,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	<i>Pelaku Usaha yang menerapkan Standar Keamanan Pangan</i>				93 Orang	93 Orang	751.771.748,00	744.370.268,00	900.193.354,00	148.421.606,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian	Aparatur Perangkat Daerah dan Kelompok Masyarakat Pengelolah Hasil Perikanan		770.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko																		
			<i>Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko</i>				75 Unit Usaha	75 Unit Usaha	751.771.748,00	744.370.268,00	900.193.354,00	148.421.606,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian			770.000.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				14 Kelompok	14 Kelompok	127.526.206,00	72.195.066,00	56.593.138,00	-70.933.068,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian	Aparatur Perangkat Daerah dan Kelompok Masyarakat Pengelolah Hasil Perikanan		330.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Ton	1 Ton	16.487.496,00	16.487.496,00	7.505.608,00	-8.981.888,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	111.038.710,00	55.707.570,00	49.087.530,00	-61.951.180,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Perekonomian Penguatan Perekonomian			280.000.000,00	DINAS PERIKANAN
		J U M L A H							17.260.444.043,00	10.649.423.284,00	9.866.566.106,00	-89.258.783.978,30						24.820.004.000,00		

Bab. IV

Penutup

Demikianlah Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perikanan Kabupaten Belitung disusun sebagai bahan acuan Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Sektor Perikanan. Sektor perikanan mampu diandalkan dalam menjalankan roda ekonomi Kabupaten Belitung yang berbasis kerakyatan melalui pembangunan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan sehingga nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya pelaku sektor perikanan.

Pencapaian Indikator sasaran untuk tahun ini diharapkan dapat mencapai target yang ditetapkan sebaik mungkin dengan segala kemampuan dan usaha mengingat banyak kegiatan yang dipending pelaksanaannya. Sehingga tahun 2025 yang merupakan Tahap kedua pelaksanaan renstra 2024-2026 dan tahap pertama periode renstra 2025-2029 dapat terwujud dengan pencapaian hasil kinerja yang maksimal dan akan memulai pelaksanaannya dengan semangat yang tinggi dan diharapkan apa yang ingin diwujudkan dapat terealisasi dengan baik sejalan visi dan misi bupati terpilih.

Dan akhirnya semoga pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan sesuai rencana yang ditetapkan dan tepat sasaran sehingga pencapaian indikator demi inidikator masing masing kegiatan dan program dapat terlaksana dengan baik.